

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### B. Buku dan Jurnal

Adhari, A., Tania, N., & Poliman, H. (2021). Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Prosiding SENAPENMAS*, 991.

<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15132>

Bury, J. (2004). Livelihoods in transition: transnational gold mining operations and local change in Cajamarca, Peru. *The Geographical Journal*, 170(1), 78–91.

<https://doi.org/10.1111/j.0016-7398.2004.05042.x>

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Laporan Tahunan Sektor Pertambangan Kalimantan Timur 2020*.

Endrico Putri, V. S. (2021). Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1754>

Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hanafi, M. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan pe). Rajawali Pers.

Handoyo, B. H. C. (2008). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Univ. Atma Jaya Yogyakarta.

Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press.

Hendryx, M. (2009). Mortality from heart, respiratory, and kidney disease in coal mining areas of Appalachia. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 82(2), 243–249. <https://doi.org/10.1007/s00420-008-0328-y>

H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*,. Raja Grafindo Persada.

- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan ke). Kencana.
- JATAM. (2019). *Laporan Penelitian: Tata Kelola Pertambangan di Kutai Kartanegara*.
- Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, & Ety Sandora. (2020). Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>
- Kelsen, H. (1978). *Pure Theory of Law*. University California Press.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan). Nusa Media.
- Mai, M., & Saputra, E. B. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review*, 1(1), 70–80. <https://doi.org/10.31933/law.v1i1.7>
- Marina Ika Sari. (2014, January 15). *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/marianaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, & Fajar Ari Sudewo. (2020a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, & Fajar Ari Sudewo. (2020b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>
- Nadya, S., Sembiring, R., & Rusmiati, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan. In *Jurnal Kertha Semaya* (Vol. 8).
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Ed. rev). Rajawali Pers.

- Roeslan saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan Pe). Ghalia Indonesia.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cetakan ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, R. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Silalahi, Daud, & Kristianto. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*. CV Keni Media.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Sitompul, I. R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1687–1696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.928>
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjani, M. (1987). *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia.
- Subagyo, J. (2005). *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangnya*. PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Sukandarrumidi. (2018). *Bahan Galian Industri*. Gadjah Mada University Press.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. PT. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.

- Surya Rusmana, R. (2017). *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat*. Universitas Lampung.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- WALHI. (2020). *Laporan Dampak Lingkungan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur*.
- Wijaya, S. A., & Hartati, W. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Asas Restitutio In Integrum Dalam Sistem Pemidanaan Pertambangan Tanpa Izin*. <https://glosarium.org/arti-restitutio-in-integrum>